|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGKECAMATAN KUNIR | NOMOR SOP | SOP/YANMUM/R.KTP-KK/2017 |
| TGL. PEMBUATAN | 20 Pebruari 2017 |
| TGL. REVISI |  |
| TGL. EFEKTIF | 20 Pebruari 2017 |
| DISAHKAN OLEH | CAMAT KUNIR,SABAR SANTOSO, S SosNIP. 19671226 198903 1 006 |
| NAMA SOP | REKOMENDASI PENGESAHAN BERKAS PERMOHONAN KK, KTP,DAN SKPWNI |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.
 | 1. Pelaksana Front line Memeriksa dan meneliti surat permohonan yang telah dikirim oleh Pemohon melalui ruang PATEN;
2. Pelaksana Front Line meregister berkas permohonan yang sudah diperiksa dan disampaikan kepada Kasi Yanmum;
3. Kasi Yanmum memerintahkan kepada Pelaksana SIAK untuk memverifikasi dan memvalidasi berkas pemohon ke aplikasi SIAK;
4. Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pelaksana SIAK disampaikan kepada Kasi Yanmum untuk diteruskan kepada Camat;
5. Camat mengesahkan Surat Pengantar berkas ke Dispendukcapil Kab. Lumajang;
6. Surat Pengantar Camat diterbitkan.
 |
| KETERKAITAN | PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : |
| SOP Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK, KTP dan SKPWNI | 1. Komputer;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Toilet;
5. Ruang tunggu bagi pemohon Rekomendasi;
6. Tempat Parkir bagi pemohon Rekomendasi.
 |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas. | * 1. Berkas Usulan disimpan sebagai arsip;
	2. Pencapaian Sasaran kegiatan dicatat untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak yang berkompeten.
 |